



Implementasi UU Nmor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Bangun Rejo

Nur Wida Yani*

Afiliasi: Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: yaninurwida@gmail.com

Arief Wahyudi

Afiliasi: Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: ariefwahyudi@unimed.ac.id

**Corresponding Author*

Article History

Submitted	: 2024-11-13	Accepted	: 2025-10-22
Revised	: 2025-10-21	Published	: 2025-12-01

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.8220>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer diperoleh langsung melalui hasil observasi langsung serta wawancara dengan narasumber dan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, literatur dan jurnal. Teknik analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan triangulasi. Hasil penelitian bahwa adanya kemajuan signifikan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, yang melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh melalui musyawarah dan perencanaan desa. Dalam implemetasinya terdapat kendala yakni kesulitan dalam menyeimbangkan harapan masyarakat, kurangnya dukungan pelatihan untuk staf, dan keterbatasan akses ke BPJS Ketenagakerjaan menjadi tantangan dalam penerapan strategi kepemimpinan kepala desa, meskipun prinsip gotong royong tetap dijunjung tinggi.

Kata Kunci: UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Sarana dan Prasarana Desa

Abstract

This study aims to determine the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the development of facilities and infrastructure in Bangun Rejo Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency. This type of research uses field research with a qualitative descriptive research method. The type of data used is primary data obtained directly through direct observation and interviews with informants and secondary data obtained through books, literature and journals. Data analysis techniques used through data reduction, data presentation, drawing conclusions and triangulation. The results of the study indicate that there has been significant progress in the development of village facilities and infrastructure, which involves comprehensive community participation through village deliberations and planning. In its implementation, there are obstacles, namely difficulties in balancing community expectations, lack of training support for staff, and limited access to BPJS Employment which are challenges in implementing the village head's leadership strategy, although the principle of mutual cooperation is still upheld.

Keyword: Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Village Head Leadership, Village Facilities and Infrastructure

PENDAHULUAN

Desa adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, mengingat pemerintah desa yaitu basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat



pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, di samping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaan serta aspek-aspek lainnya. Akan tetapi, dalam melaksanakan pembangunan desa harus memperhatikan kondisi desa. Menurut Zaini dalam (Didik dkk, 2016: 128), “ Ada tiga pilar strategi pembangunan pedesaan sebagai landasan proses transformasi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Pilar pertama, pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan akses keluarga untuk memperoleh pelayanan sosial dasar, khususnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tujuan untuk meningkatkan produktifitas tenaga dan kualitas hidup keluarga. Pilar kedua, pemberdayaan ekonomi rakyat, yang dilaksanakan melalui kebijakan penyediaan akses kelompok usaha masyarakat terhadap investasi, pemilikan aset tanah, masukan sumber daya produksi, teknologi produksi/pertanian, dan lembaga ekonomi. Kemudian pembangunan desa merupakan suatu cara upaya dalam mengembangkan wilayah suatu pedesaan yang kemudian dapat menjadikan suatu desa yang mampu mengelolah sumber kekayaan desa dengan baik. Pembangunan di desa juga merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersamasama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong. yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif.

Kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas pembangunan desa dan perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Adanya pembangunan akan berhasil apabila Kepala desa menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut Sondang P. Siagian dalam (Debora Sanur 2023:12) dalam menjalankan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan kepala desa harus berorientasi ke masa depan yaitu sebagai aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, produktif, bersih, berwibawa, profesional, kreatif dan inovatif, transparan, peka dan tanggap, antisipatif, dan mempunyai visi dan misi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian empiris atau penelitian lapangan merupakan metode yang mengutamakan pengamatan langsung terhadap gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga, atau negara, dengan mempertimbangkan konteks di luar pustaka dan memeriksa

fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, literatur, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sarana dan Prasarana di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Secara umum hal yang sangat utama dalam suatu desa yaitu meningkatkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan cara menyeluruh. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Desa dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan suatu kemajuan desa agar semakin meningkat dalam pembangunannya pemerintah desa juga dituntut mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan yang tertuang di dalam peraturan menteri desa dan Undang-Undang tersebut, pembangunan akan tercapai apabila aparatur desa mampu mengelola desa dengan baik. Kebijakan pembangunan Desa Bangun Rejo dilaksanakan berdasarkan partisipatif masyarakat melalui tatanan yang dilaksanakan yang dirangkum dalam dokumen RPJM-Desa Tahun 2022-2028 yang diimplementasikan dalam dokumen RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen APB Desa untuk dilaksanakan yang semuanya berdasarkan kebutuhan lingkungan masing-masing bukan faktor keinginan semata. Pemerintah Desa sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana semua aspirasi masyarakat bisa terpenuhi akan tetapi dengan adanya regulasi yang ada, dan berdasarkan skala prioritas, semua usulan secara bertahap dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bangun Rejo. Desa Bangun Rejo memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi penduduknya. Terdapat beberapa fasilitas pendidikan seperti PAUD, TK, SD, MI, dan pondok pesantren, serta sarana kesehatan seperti puskesmas dan posyandu yang tersebar di beberapa dusun. Selain itu, terdapat juga fasilitas umum seperti masjid, mushola, gereja, kantor desa, dan lapangan sepak bola yang berfungsi sebagai pusat aktivitas masyarakat. Keberadaan sarana dan prasarana ini memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan desa, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana ini diharapkan dapat terus berlangsung seiring dengan upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Desa Bangun Rejo memiliki luas sekitar 692

hektar dan dihuni oleh 11.023 jiwa. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan beberapa desa lain dan perkebunan besar, yang menunjukkan pentingnya posisi desa ini dalam konteks agrikultural dan keterhubungan dengan wilayah sekitarnya. Dari aspek penggunaan lahan, sebagian besar lahan di Desa Bangun Rejo digunakan untuk pemukiman (277 ha) dan perkebunan (282 ha), dengan sebagian kecil untuk persawahan, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Keberadaan perkebunan besar seperti PTPN II dan perkebunan swasta lainnya juga mempengaruhi mata pencaharian utama penduduk, yang didominasi oleh pekerjaan di sektor perkebunan dan industri. Secara keseluruhan, Desa Bangun Rejo menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi pembangunan fisik maupun sosial. Keberagaman budaya dan agama yang ada di desa ini juga merupakan potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai masyarakat yang lebih maju, aman, dan sejahtera. Untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintah telah dibuat dan diimplementasikan. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga lembaga non- pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan. “Pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.” (Kamahuddin Rustian, 2006 : 53). Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Upaya Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, di temukan bahwa dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa, Kepala Desa Bangun Rejo menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas strategi kepemimpinan yang diterapkan. Ketika menggunakan pendekatan yang mengandalkan pertukaran imbalan, kepala desa sering kali mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat dengan apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada imbalan untuk memotivasi partisipasi dan sering kali dihadapkan pada batasan anggaran

yang membatasi kapasitas untuk memenuhi janji. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, kepala desa menghadapi masalah terkait kurangnya dukungan dan pelatihan untuk staf, yang menghambat peningkatan keterampilan mereka. Selain itu, keterbatasan dalam pendaftaran masyarakat ke BPJS Ketenagakerjaan mengurangi rasa aman dan partisipasi aktif dalam proyek. Kepala desa juga kesulitan membangun hubungan erat dengan staf dan komunitas, mengakibatkan koordinasi yang kurang partisipasi aktif dalam proyek efektif dan tantangan dalam menciptakan nilai-nilai bersama di antara berbagai kelompok. Terakhir, dalam membangun hubungan saling peduli dan komitmen, kepala desa menghadapi tantangan dalam menjaga standar moral dan etika serta dalam menerapkan perubahan dan pengembangan manajemen diri dengan efektif. Semua tantangan ini mempengaruhi keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana desa secara keseluruhan.

Kepala Desa dapat mengupayakan proses pergerakan pembangunan desa berjalan dengan baik, artinya tidak terjadi kesimpangsiuran dan kesalahpahaman. Di dalam proses ini Kepala Desa dapat mengupayakan Penyelenggaraan pemerintah desa yang partisipatif, meningkatkan kualitas sumber daya melalui sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, menyusun regulasi desa, mewujudkan ekonomi yang kokoh dan, meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan. Strategi merupakan rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis pemerintah dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utamanya dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Adisasmita, 2006). Strategi kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Strategi yang dimiliki oleh Bapak Misno berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan menjadi strategi membangun desa dengan musyawarah desa, strategi responsif pada kebutuhan masyarakat dan strategi motivasi dan inspirasi untuk masyarakat desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta SDA dan lingkungan secara berkelanjutan.

Musyawarah desa dalam hal pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bangun Rejo dianggap warga tidak hanya musyawarah biasa namun ada energi yang didapat oleh masyarakatnya melalui musyawarah ini. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar

yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Membangun desa merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, aspek penting dalam membangun desa yang keberhasilannya mutlak harus didukung oleh semua masyarakat. Kepala Desa Bangun Rejo membuat tata cara peraturan desa tentang pemerintahan desa, peraturan desa tentang pendapatan hasil desa, peraturan-peraturan desa yang mengikat masyarakat untuk melakukan peraturan tersebut. Pembangunan yang terlihat mencolok yaitu pembangunan fisik, seperti tahun pertama (2022) di beberapa dusun di bangun jalan lapen serta drainase. Kenyataan diatas menjelaskan bahwa pada masa kepemimpinan Kepala Desa Saridjo pembangunan menjadi perubahan yang sangat berarti (signifikan). Pembangunan desa termasuk di Desa Bangun Rejo merupakan suatu proses yang berlangsung di wilayah desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kemampuan kepemimpinan seseorang, seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Misno di Desa Bangun Rejo, memiliki dampak besar dalam proses pembangunan desa, di mana kepala desa, sebagai pemimpin pemerintahan dan perwakilan masyarakat, bertanggung jawab untuk mengatur, menjaga, serta memotivasi warga, sehingga peran kepala desa sangat menentukan kemajuan dan perkembangan pembangunan di desa tersebut. Menurut Weber dalam Lawang (2010), kepemimpinan dalam organisasi birokratis harus mampu memisahkan antara aspek pribadi, seperti emosi dan hubungan sosial, dengan kebutuhan birokrasi itu sendiri, sehingga seorang pemimpin tidak dapat membuat keputusan pembangunan berdasarkan keinginannya sendiri, melainkan harus merumuskannya bersama dengan pengikut atau masyarakatnya. Dalam konteks ini, Desa Bangun Rejo sebagai sebuah desa sudah melaksanakan pembangunan yang sudah berpusat di desa sendiri dan desa sendirilah yang mengatur pembangunan desanya, baik pembangunan fisik atau infrastruktur desa maupun pembangunan manusia (SDM). Strategi kepemimpinan yang dilakukan oleh Bapak Misno dikatakannya sebagai suatu rencana yang tersusun rapi, yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin rakyatnya.

Dalam menilai efektivitas strategi kepemimpinan menurut Sergiovani (2006), ada beberapa aspek yang dipertimbangkan. Pertama, strategi bartering di mana pemimpin memberikan apa yang diinginkan oleh bawahan sebagai imbalan atas apa yang diinginkan oleh pemimpin. Strategi ini menekankan pada pertukaran keinginan dan membangun kerja sama serta kepatuhan. Kepala Desa Bangun Rejo telah menerapkan strategi ini melalui musrenbangdes di awal kepemimpinannya, dengan bertukar pikiran dan merencanakan pembangunan desa ke depan. Kedua, strategi building, di mana pemimpin menciptakan iklim dan dukungan interpersonal yang baik untuk meningkatkan kesempatan staf dalam memenuhi

kebutuhan prestasi, tanggung jawab, kompetensi, dan penghargaan diri. Strategi ini lebih menekankan pada penciptaan kondisi psikologis yang mendukung daripada pada pertukaran.

Dalam konteks ini, Kepala Desa Bangun Rejo fokus pada program kerja pembangunan fisik desa, namun belum memberikan cukup kesempatan kepada staf dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan serta mendaftarkan masyarakat ke BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan keamanan kerja. Ketiga, strategi binding, di mana pemimpin dan staf bersama-sama mengembangkan nilai-nilai yang sama untuk membangun komunitas. Strategi ini berhubungan dengan bagaimana Kepala Desa Bangun Rejo bekerja sama dengan aparat desa dan kelompokkelompok lain untuk menciptakan kinerja yang baik. Saat ini, Kepala Desa Bangun Rejo belum sepenuhnya membangun ikatan yang erat dengan staf dan komunitas melalui pendekatan dan pertemuan rutin. Keempat, strategi bonding, di mana pemimpin menekankan pada hubungan saling peduli dan bergantung yang terbangun dari pelaksanaan kewajiban dan komitmen bersama. Strategi ini mendukung kepemimpinan dan pengembangan yang berkelanjutan dengan menciptakan komunitas yang memiliki pemikiran, hati, dan praktik yang sama. Bonding menekankan moral sebagai sumber kekuasaan dan merupakan bentuk tanggung jawab kepala desa dalam menjalankan strategi-strategi sebelumnya. Binding dan bonding efektif ketika diterapkan pada tahap transformasi dan pengembangan manajemen diri, dengan berfokus pada pertimbangan rasional, hubungan humanis, dan motivasi intrinsik pada pengikut.

SIMPULAN

Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah menunjukkan kemajuan yang nyata dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah desa dan lembaga BPD, sehingga mencerminkan prinsip pembangunan partisipatif. Pemerintah desa berupaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan nilai gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Berbagai program telah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Dalam proses implementasi untuk mengatasinya kendala yang terjadi, kepala desa berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung melalui peningkatan keterampilan aparatur, penguatan hubungan antarstaf dan masyarakat, serta penerapan etika dan manajemen diri yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Creswell. (2015). *Riset Perencanaan, Dan Evaluasi Riset Kualitatif Dan Kuantitatif*

Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Darmawan, A. (2018). Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi Di Desa Terisolir (Desa Sarongan , Banyuwangi , Jawa Timur). *Jurnal AKP*, 8(1), 79– 97.
- Pandey V., S. (2016). Pentingnya Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Sebagai Upaya Membangun Desa Di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. *Tekno*, 14(66), 44– 52.
- Prayogo, J. B., Muti'ah, D., Habibulllah, A. W., & Boemiya, H. (2022). Penyalahgunaan Wewenang Pada Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan). *Inicio Legis*, 3(2), 91–106.
- Marizal, W., Yamin, A., & Dewi, G. (2023). Membangun Desa Dengan Konsep Welfare Village (Kajian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram: University Press
- Nuraini, Nurulsyam, A., & Mutholib, A. (N.D.). Optimalisasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Universitas Galuh, 543.
- Suryani, R. A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Dea Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial*, 18(1)
- Wardana, D. J. (2019). Potik Hukum Pemerintahan Desa. *In Jurnal Justiciabelen* (Vol. 1, Issue 2).